

ABSTRACT

The Satoyama Agriculture Development Tools (SADT) is a widely used set of measures used across the globe to assess the sustainability of agriculture land management. While the SADT only uses three dimensions: environmental, economic, and social factors, a fourth dimension, namely, institutional factors, is considered important to understand the authority and ability to facilitate sustainable development in a comprehensive, harmonious, and balanced manner. This study adds an institutional dimension to the SADT framework to evaluate the sustainability of agriculture land management in Magetan Regency, Indonesia. Specifically, this study compares the perceptions of farmers and government officers regarding current agriculture land management by conducting a questionnaire survey and semi-structured interviews. The results reveal that there are gaps between the perceptions of farmers and government officers, especially regarding the environmental and socio-economic dimensions of land management. Government officers tend to believe that the environment, including keystone species, is well protected while farmers disagree. The Satoyama Evaluation shows that Sarangan Village is viewed as “Satoyama Like” from the point of view of government officers but appears to be “In Transition” based on farmer perceptions. Adding an institutional factor provides fruitful information on the perception gap between farmers and government officers in terms of local government conflict management performance. Since farmers still use pesticides in the study site, this study provides clues regarding how the government could promote environmentally friendly agricultural measures among farmers. The results suggest that the government should not only provide information to help farmers recognize what they can do to increase the sustainability of agricultural land but should also help create opportunities for farmers to freely discuss their concerns while allowing the various stakeholders to collaborate toward sustainable agricultural management. Besides, institutional factors can be determined in exploring the perception gap between farmers and government officers.

Keywords: sustainable agriculture land management, Satoyama assessment, Magetan, farmers, government officers, institutional dimension

INTISARI

Satoyama Agriculture Development Tools (SADT) adalah serangkaian penilaian yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk menilai keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian. Sementara SADT hanya menggunakan tiga dimensi: faktor lingkungan, ekonomi, dan social. Sedangkan faktor keempat, yaitu, faktor kelembagaan/institusional, dianggap penting untuk memahami otoritas dan kemampuan untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan secara komprehensif, harmonis, dan seimbang. Studi ini menambahkan dimensi kelembagaan pada kerangka SADT untuk mengevaluasi keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Magetan, Indonesia. Secara khusus, studi ini membandingkan persepsi petani dan pegawai pemerintahan tentang pengelolaan lahan pertanian dengan melakukan survei kuesioner dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara persepsi petani dan pegawai pemerintahan, terutama mengenai dimensi lingkungan dan sosial ekonomi dari pengelolaan lahan. Pegawai pemerintah cenderung percaya bahwa lingkungan, termasuk spesies keystone, dilindungi dengan baik sementara petani tidak setuju. Evaluasi Satoyama menunjukkan bahwa Desa Sarangan dipandang sebagai “Satoyama Like” dari sudut pandang pegawai pemerintah tetapi “In Transition” berdasarkan persepsi petani. Menambahkan faktor kelembagaan memberikan informasi yang bermanfaat tentang kesenjangan persepsi antara petani dan pejabat pemerintah dalam hal kinerja manajemen konflik pemerintah daerah. Karena petani masih menggunakan pestisida di lokasi penelitian, penelitian ini memberikan petunjuk tentang bagaimana pemerintah dapat mempromosikan langkah-langkah pertanian ramah lingkungan di kalangan petani. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan informasi untuk membantu petani mengenali apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan keberlanjutan lahan pertanian tetapi juga harus membantu menciptakan peluang bagi petani untuk secara bebas mendiskusikan masalah mereka sambil memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menuju pengelolaan pertanian berkelanjutan. Selain itu, faktor kelembagaan dapat ditentukan dengan mengeksplorasi kesenjangan persepsi antara petani dan pejabat pemerintah.

Keywords: keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian, Satoyama, Magetan, petani, pegawai pemerintahan, faktor institusional